



BINGKAI IDENTITAS DALAM KONFLIK GEOPOLITIK: INTERVENSI MILITER RUSIA DI UKRAINA

Rizky Widiasta

Universitas Indonesia; email: rwidiasta@gmail.com

Abstract

This article is written to analyze the conflict between Russia and Ukraine that led to the fall of Krimea. Russia defends its act by stating that the annexation of Krimea was an effort to protect Russian ethnicities from the political turmoil happened during revolutionary movement. By specifically analyzing the similarities on identity between Ukrainians in Crimea with Russian ethnicities, this article argues that bounded historical similarities could trigger states to oppress other to achieve its geopolitical ambition. This article revealed that certain similar identities by some states could be used as an instrument to justify a unilateral action towards other country.

Keywords: *Geopolitics, identity conflict, strategic denial*

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah konflik antara Rusia dengan Ukraina yang berakhir dengan lepasnya wilayah Krimea. Rusia membela diri dengan menyatakan bahwa aneksasi terhadap Krimea adalah upaya membebaskan wilayah tersebut bertujuan untuk melindungi mayoritas warga etnisnya dari dampak ketidakstabilan politik yang terjadi di Ukraina akibat munculnya gerakan revolusioner. Dengan analisis secara khusus yang menitik beratkan pada kesamaan identitas dari warga Ukraina di Krimea dengan orang-orang Rusia, tulisan ini secara umum berargumen bagaimana secara historis kesamaan identitas dapat menjadi faktor yang mendukung tindakan opresif yang dilakukan oleh suatu negara dalam meraih ambisi geopolitiknya. Tulisan ini mengungkap bagaimana suatu identitas yang dimiliki bersama oleh negara dengan negara lainnya dapat digunakan sebagai isu krusial untuk menjustifikasi tindakan unilateral terhadap negara lain.

Kata Kunci: *Geopolitik, konflik identitas, strategic denial.*

Pendahuluan

Menurut para akademisi politik etnis, secara kualitatif ada 2 klasifikasi dasar dari identitas nasional yaitu kewarganegaraan dan etnis. Yang pertama, masyarakat dalam suatu negara bangsa berpikir apa yang bisa mereka lakukan dan saling membedakan satu dengan lainnya melalui prinsip-prinsip politik yang berbeda, institusi yang beragam, serta keinginan untuk berpartisipasi dengan berbagai cara dalam praktek bernegara. Sedangkan identitas etnis lain dengan kewarganegaraan karena perbedaan antara satu dengan yang lain didasari pada garis keturunan leluhur, budaya, bahasa, agama, tradisi, dan ras (Shulman, 2004). Ukraina merupakan negara dengan identitas nasional yang digolongkan sebagai Slavik Timur (Rusia, Ukraina, Belarus) serta memiliki dua etnis utama (penduduk asli Ukraina dan orang-orang Rusia) yang berbagi bahasa serta kultur yang sama. Orang-orang Slavik itulah yang selalu menunjang visi nasional dengan diskursus yang menyebutkan bahwa orang-orang dengan etnis Rusia bukanlah sembarang minoritas karena bahasa dan budaya mereka adalah bagian dari identitas lokal telah menjadi bagian dari Ukraina selama ratusan tahun. Pendek kata, para nasionalis dari golongan Slavik Timur ini melihat Ukraina sebagai negara kesatuan yang terbentuk secara otentik oleh dua etnis utama yang secara historis dan budaya sangat erat sehingga kehadiran masyarakat etnis Rusia di Ukraina memiliki kehadiran yang kuat karena bahasa dan budayanya dianggap sebagai sesuatu yang bernilai (Shulman, 2004). Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi militer Rusia di Ukraina terjadi secara natural karena kebijakan luar negeri Ukraina yang pro Barat (Pridham, 2014; Götze, 2015; Smith, 2015; Tolksdorf, 2015; Casier, 2016; Rieker and Gjerde, 2016; Nitoiu, 2017). Tulisan ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa konflik geopolitik dapat semakin rentan terjadi apabila negara yang bersengketa justru memiliki persamaan identitas.

Seperti pedang bermata dua, persoalan identitas yang berasal dari satu akar seolah memberikan indikasi bahwa Ukraina berada di dalam bayang-bayang Rusia. Berbeda dari negara-negara Eropa lain yang sudah meninggalkan imperialisme sehingga mampu secara jelas membedakan kebijakan-kebijakan antara era kekaisaran dengan negara-bangsa, Rusia masih terasa belum bisa meninggalkan pola imperial pada zaman kekaisaran dahulu yang memiliki obsesi terhadap kekuatan militer dan ekspansi teritori (Tolz, 2002). Pada era kekaisaran golongan akar rumput di Ukraina dicegah aksesnya dari literasi-literasi pemberontak (Yekelchik, 2013), tujuannya agar mereka tidak terparpar

paham nasionalis dan radikal (Hosking, 2008). Besarnya pengaruh dan jumlah penduduk etnis Rusia di Ukraina juga dapat dilihat sebagai dampak dari imigrasi. Sebelum Perang Dunia II meletus keseimbangan demografi di Ukraina sudah tergunjang sebagai dampak dari bencana kelaparan hebat yang melanda negeri tersebut pada tahun 1932. Hingga pada akhirnya tahun 1946 setelah Perang Dunia II berakhir diperkirakan penduduk Ukraina merosot sampai 25 juta penduduk setelah kehilangan sepertiga jumlah keseluruhan warga. Namun pada sensus tahun 1959 jumlahnya telah melesat hingga 42 juta penduduk. Pada tahun 1945 sampai 1955 saja ada sekitar 3.5 juta orang tiba dari berbagai penjuru Uni Soviet untuk bekerja di pabrik dan pertambangan (Delwaide, 2014). Menurut Olzanski sampai sekitar tahun 1990 sepertiga penduduk Ukraina saat ini datang dari seluruh penjuru Uni Soviet dan keturunan-keturunan mereka terkonsentrasi di wilayah-wilayah industri seperti Kiev dan Krimea (Olszański & Kucińska, 2012). Karena berbagai alasan historis itulah posisi Ukraina sebagai wilayah komplementer menjadi sangat berarti bagi Rusia.

Sampai pada akhirnya Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet bubar, pembentukan Ukraina sebagai negara independen pada Desember 1991 secara sepihak mengejutkan banyak orang-orang etnis Rusia. Secara perlahan, butuh sekitar 5 tahun bagi mereka untuk membiasakan diri dengan Ukraina yang telah berdaulat dan berdiri sendiri sebagai negara bangsa. Permasalahan yang masih mengganggu saat itu adalah permasalahan yang sifatnya politis terkait sengketa status Sevastopol dan pembagian aset-aset bekas divisi-divisi bentukan Uni Soviet (Molchanov, 1996). Hingga saat ini pasca aneksasi Krimea, meskipun ditekan secara politik dan militer oleh Rusia, ancaman serta kelemahan terbesar Ukraina terletak pada sektor ekonomi. Kelemahan inilah yang bahkan sampai membuat kalangan demokrat Rusia enggan mengakui kalau Ukraina adalah negara berdaulat (Larrabee, 1996). Karena lemahnya bantuan barat, Ukraina terpaksa tunduk terhadap keinginan Rusia yang pada pertengahan dekade 90an menentang ekspansi NATO. Ketika negara ex-Soviet lain seperti Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko berpihak pada NATO, Ukraina cenderung memilih status non-blok. Namun dengan Treaty of Friendship, Cooperation, and Partnership pada tahun 1997 meskipun batas negara masih belum diakui Rusia, keamanan Ukraina meningkat lebih baik dengan pembagian wilayah armada laut di Laut Hitam (Larrabee, 1996).

Hanya saja banyak warga Ukraina yang menyatakan tidak puas terhadap kerja sama negaranya dengan Rusia sehingga mereka menginginkan agar Ukraina dapat lebih terintegrasi dengan Uni-Eropa. Pada 2004, 3 negara Baltik Estonia, Latvia, dan Slovenia, telah lebih dulu memutuskan untuk bergabung dengan NATO. Rusia menghadapi dilema bahwa kemungkinan perbatasannya akan terancam dengan kehadiran NATO di negara-negara eks-Soviet. Meskipun para pemimpin Rusia berusaha menganggap bahwa penambahan anggota NATO tidak lagi relevan pasca Perang Dingin, para pemimpin Barat menganggap NATO masih memiliki kepentingan dalam menjaga kedamaian sehingga upaya untuk memperluas pengaruh dianggap masih relevan pasca-Perang Dingin (Gidadhubli, 2018).

Intervensi politik dan militer yang dilakukan Rusia saat konflik Georgia (2008), dan Ukraina (2014) menunjukkan sebuah kebijakan luar negeri suatu negara yang nampaknya adalah kebijakan yang bersifat ekspansionis, dapat diartikan pula sebagai respon menghadapi ancaman dalam tatanan dunia yang anarki. Selain itu perilaku koruptif dari pimpinan negara semakin memantapkan rakyat Ukraina untuk semakin terintegrasi dengan Eropa. Kemauan untuk menciptakan kondisi negara yang lebih progresif membuat rakyat Ukraina terpacu untuk berunjuk rasa. Hanya saja, rakyat Ukraina tentu tidak akan mengira bahwa perjuangan mereka untuk lepas dari kekuasaan otoritarian, korupsi, serta berbagai masalah sosial-ekonomi lainnya akan berujung pada aneksasi Rusia terhadap beberapa wilayah Ukraina termasuk Crimea yang berbatasan dengan Rusia, negara yang saat ini dikepalai oleh Presiden Vladimir Putin. Latar belakang konflik dapat ditarik dari sebuah gerakan demonstrasi besar-besaran oleh warga Ukraina di Maidan Nezalezhnosti sebuah taman/lapangan yang terletak di pusat kota Kiev pada 2013. Peristiwa gelombang demonstrasi di taman itu kini dikenal dengan sebutan Euromaidan (lapangan Eropa) dikarenakan saat itu warga menuntut pemerintah untuk lebih terintegrasi dengan Uni-Eropa. Unjuk rasa itu berakhir dengan kerusuhan dan meningkatkan eskalasi politik domestik dan memicu gelombang demonstrasi besar lainnya di berbagai belahan negara Ukraina. Unjuk rasa brutal tersebut mencapai klimaks pada Februari 2014 dan berujung dengan pemberhentian paksa Perdana Menteri Ukraina saat itu Viktor Yanukovich yang melarikan diri dari negaranya saat pengunjuk rasa telah berhasil menguasai parlemen dan menduduki kediaman pribadinya (Balmforth, 2018). Kondisi itu akhirnya memaksa Ukraina untuk menyelenggarakan parlemen jalanan untuk

memilih Perdana Menteri baru yang pro Uni-Eropa. Rusia yang tidak mengakui pemerintah interim kemudian memutuskan untuk melakukan intervensi militer di Ukraina.

Intervensi militer Rusia di Ukraina meliputi serangkaian konflik bersenjata yang berujung pada pendudukan berbagai wilayah Ukraina termasuk Krimea yang di aneksasi pada 18 Maret 2014 dan konon dilakukan oleh para prajurit tanpa insignia (Burnbaum, 2018). Strategi Rusia ini menarik untuk dicermati karena dengan menggunakan kekuatan militer untuk operasi non-militer maka lawan secara hukum internasional tidak dapat menggunakan kekuatan militer (Westerlund and Norberg, 2016). Hal tersebut masuk akal karena bias dari operasi rahasia ini membuat jejaring mutual defence dari NATO kepada Ukraina menjadi lebih sulit untuk mengambil tindakan. Di sisi lain terdapat pula mobilisasi militer yang melibatkan oknum tertentu dari pihak Ukraina yang pro terhadap Rusia mengingat di Krimea mayoritas penduduk adalah etnis Slavik yang berbahasa Rusia serta fakta jika Sevastopol, kota pelabuhan di Krimea tak lain terdapat basis pangkalan Angkatan Laut Rusia. Gerakan separatis di Krimea pada akhirnya dapat menduduki parlemen daerah dan memaksa untuk melakukan referendum pemisahan diri dari Ukraina yang hasilnya berakhir dengan keputusan bahwa rakyat Krimea menginginkan diri lepas dari Ukraina. Entah apakah referendum tersebut bersih dari intervensi politik dan rakyat Krimea betul-betul menghendaki hal tersebut atau tidak, yang pasti hingga kini wilayah itu secara administratif dikuasai oleh federasi Rusia.

Dalam kasus konflik Rusia dengan Ukraina, penulis melihat bahwa tindakan unilateral Rusia disebabkan karena posisi Ukraina yang merupakan *buffer zone* antara NATO dan Federasi Rusia sehingga menjadikan posisi negara tersebut strategis secara geopolitik untuk saling berebut pengaruh ideologis maupun teritorial. Aneksasi terhadap Krimea adalah konflik geopolitik dengan negara-negara Barat. Masyarakat Rusia menganggap tindakan tersebut sebagai bagian dari reunifikasi yang dapat memperkuat posisi militer negara mereka di Laut Hitam dalam menghadapi ancaman NATO (Biersack and O'Lear, 2014; Blockman, 2015; Suslov, 2015). Klaim geopolitik itu dieksekusi dengan memanfaatkan isu kesamaan identitas rakyat Ukraina sebagai bagian dari masyarakat Slavik Timur dan faktor historis Ukraina yang dulunya adalah bagian dari wilayah kekaisaran Rusia. Masyarakat asli Ukraina memiliki preferensi untuk meninggalkan identitas etnis, budaya serta leluhur dan cenderung merasa bangga

terhadap identitas kewarganegaraan mereka (Larrabee, 1996; Karabanova, 2003; Shulman, 2004; Kulyk, 2016). Disatu sisi setelah Uni Soviet runtuh, Rusia mengalami krisis identitas dan mendambakan kembali kejayaan masa kekaisaran (Molchanov, 1996; Korostelina, 2003; Teper, 2016). Kajian terdahulu juga mempelajari bahwa kebijakan Rusia untuk bersikap agresif didasari pada diskursus tentang etnis. Etnis minoritas di Ukraina menyetujui kebijakan ekspansionis dikarenakan sering mendapat diskriminasi dari golongan ultranasionalis sayap kanan (Solchanyk, 1998; Alexseev, 2016). Melalui berbagai klaim identitas tersebut, Rusia seolah mengklaim negaranya memiliki hak untuk melindungi warga minoritas di Ukraina dari gerakan revolusioner dan riak revolusi yang mengakibatkan negara Ukraina menjadi tidak stabil. Ada banyak sekali kajian yang membahas sebab-akibat perang saudara yang terjadi di suatu negara. Perang saudara biasanya terjadi di satu negara dikarenakan beragam faktor seperti ideologi, pandangan politik. Namun dalam kasus Ukraina dan Rusia, perang saudara terbingkai dalam paradoks antara identitas etnis dan identitas kewarganegaraan sehingga penulis menilai belum banyak peneliti yang menjustifikasi tindakan unilateral suatu negara karena adanya sentimen identitas.

Sengketa Krimea: antara Identitas dan Geopolitik

Secara empirik konflik di Ukraina terjadi karena adanya ketidakadilan sosial antara sistem dengan pelaksanaan program pemerintah yang menyebabkan kesenjangan. Rakyat Ukraina menuntut perbaikan di berbagai aspek pemerintahan dan menginginkan negaranya untuk lepas dari pengaruh Rusia agar bisa lebih terintegrasi dengan Uni-Eropa. Ada tiga aspek yang menjadi sorotan penulis terhadap tindakan unilateral Rusia. Yang pertama tentu saja adalah identitas. Rakyat Ukraina cenderung untuk berpegang kepada nasionalisme yang berdasarkan kewarganegaraan dengan mempertimbangkan kedaulatan negara dibandingkan dengan sentimen etnis. Identitas nasional memiliki peran krusial didalam kajian psikoanalisis dan hubungan internasional. Julia Kristeva mengutip dari Montesquieu (*The Spirit of The Law, 1848*) bahwa identitas nasional adalah identitas yang berasal dari negara yang nilai, adat dan sejarahnya kita anut dan harus mengakui keberagaman yang berada di dalam suatu teritori (Caputi, 1996). Maka dari itu identitas

nasional sejatinya adalah menghargai perbedaan, untuk hidup bernegara berdampingan dan menghargai toleransi.

Aspek yang kedua adalah geopolitik. Ada tiga atribut yang biasanya saling terhubung satu sama lain dalam satu kerangka kerja konseptual. Tiga hal tersebut adalah Interpretasi teritori, sumber daya alam, dan distribusi *power*. Fokus operasi per individu tiap atribut ketiganya terletak pada bagaimana teritori, sumber daya alam, dan power dapat meningkatkan eskalasi, menetralsir, maupun menurunkan eskalasi ketegangan. Dalam bukunya *Geopolitics and Maritime Territorial Disputes in East Asia*, Emmers mengungkapkan salah satu hubungan antara ketiga atribut dalam geopolitik bersifat instrumental, ketika satu atribut digunakan oleh negara yang melakukan klaim untuk memperoleh 2 atribut yang lain (Emmers, 2009). Melalui konteks konflik antara Rusia dan Ukraina penulis ingin memodifikasi wacana geopolitik yang agak sedikit berbeda dari apa yang sudah disampaikan Emmers karena jika biasanya suatu wilayah diperebutkan karena memiliki sumber daya potensial, dalam kasus sengketa Krimea, sumber daya alam bukan berada dalam posisi yang diperebutkan karena Rusia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan Ukraina adalah salah satu konsumennya. Rusia menggunakan perannya sebagai produsen gas alam untuk mengampusti kerja sama dengan pemerintah revolusioner yang bertujuan untuk memperlemah Ukraina yang merupakan hasil kudeta. Jika ingin ditarik relevansinya, maka diskursus tentang identitas digunakan sebagai motor penggerak untuk secara geografis melakukan okupasi di Krimea. Kedua aspek tersebut melahirkan aspek berikutnya yang ketiga yaitu kebijakan politik untuk mewujudkan kembali kejayaan bangsa slavik melalui proyeksi Soviet jilid 2. Setelah wilayah Krimea yang didalamnya terdapat pangkalan militer Rusia ini berhasil dikendalikan, Rusia menjustifikasi tindakannya ini kepada dunia internasional dengan melakukan *strategic denial*.

Legalisasi Konflik Identitas

Strategic denial ini dikemukakan oleh Allison dan menggambarkan betapa Rusia layaknya negara *major power* lain membingkai aktifitas koersifnya sesuai dengan konstitusi negara dan hukum internasional yang berlaku. Aneksasi terhadap Krimea menghasilkan konsekuensi berupa sanksi serta hujatan dari komunitas Internasional. Tindakan itu dinilai telah melanggar beberapa perjanjian dan hukum internasional antara

lain: *Agreements on Establishing The Commonwealth of Independent States in 1991, Helsinki Accords, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of 1994, dan Treaty on Friendship, Cooperation, and Partnership Between Russian Federation and Ukraine* (UKRAINE, 2018). Namun selayaknya negara *major power* lainnya, Rusia, memosisikan diri sebagai aktor yang mengedepankan hukum dalam membingkai tindakan represifnya. Hal itu berarti mengeksploitasi kelemahan-kelemahan hukum internasional mengenai intervensi militer dan penentuan nasib yang dialami suatu negara pasca revolusi. Ketika eskalasi krisis meningkat, Rusia menggunakan retorika hukum untuk mengaburkan batas antara legal dan ilegal, menjustifikasi masalah dengan fakta-fakta bias (Allison, 2014). Rusia menekankan bahwa tindakannya terhadap Krimea itu valid secara hukum dan memiliki legitimasi, berbanding terbalik dengan kekuasaan interim pasca tumbanganya Yanukovich setelah dikudeta saat peristiwa Euromaidan. Dengan menganggap bahwa pemerintah Ukraina saat ini tidak memiliki legitimasi itulah Rusia mengklaim bahwa ‘melepaskan’ Krimea dari Ukraina dengan menggunakan kekuatan militer adalah tepat karena tidak ditujukan kepada sebuah negara yang berdaulat sesuai dengan yang tertulis dalam artikel 2(4) Piagam PBB (*UN Charter Repertoire of the Practice of the Security Council 18th Supplement 2012-2013, Article 2 paragraph 4 ‘All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations’*).

Allison (2014) menyebutkan beberapa klaim Moskow yang diangkat secara formal dalam forum Dewan Keamanan PBB pada pertemuan darurat tanggal 1 dan 3 Maret 2014 sebagai upaya dalam melegalisasi aktifitas koersifnya di Crimea:

1. Moskow mengklaim bahwa pemerintah interim di Kiev pasca euromaidan tidak sah karena dilakukan melalui kudeta dengan kekerasan.
2. Moskow mengklaim bahwa keamanan hak asasi manusia kaum minoritas berkebangsaan Rusia di Crimea terancam program-program dari pemerintah interim Ukraina.
3. Putin berpendapat bahwa pasukan Rusia yang berpusat di Crimea dan Laut Hitam mendapat ancaman langsung dari golongan anti-Rusia.
4. Adanya potensi krisis pengungsi sebagai dampak berkembangnya gelombang revolusi di akhir masa kepemimpinan Yanukovich.

5. Federasi Rusia menjamin keamanan warganya melampaui batas negara (*Russian Constitution, article 61, paragraph 2, 'The Russian Federation shall guarantee to its citizens protection and patronage abroad'*).

6. Presiden Viktor Yanukovich sebagai pemimpin yang seharusnya legitimasi bersama PM Republik Otonomi Crimea, Sergey Aksyonof meminta secara resmi kepada Rusia untuk membantuk stabilisasi Ukraina (Allison, 2014).

Dengan kondisi-kondisi diatas, Putin menegaskan untuk secara efektif membatalkan semua perjanjian bilateral dengan Ukraina karena kudeta yang inkonstitusional, menurut Moskow, menyebabkan adanya negara baru di wilayah Ukraina sehingga tidak sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang telah tercatat (*Russian Constitution*). Hal tersebut berarti secara langsung akan melumpuhkan Ukraina yang selama ini terus mendapat bantuan ekonomi dari Rusia.

Posisi Ukraina dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia

Lalu apakah yang menjadi tujuan Rusia melakukan aneksasi? Hubungan dengan negara-negara ex-Soviet selalu menjadi prioritas kebijakan luar negeri Rusia. Hanya saja kekhawatiran terhadap ekspansi NATO selalu menjadi penghalang bagi hubungan Rusia dengan Barat (Kucibek, 1999). Ekspansi ini dinilai beberapa kalangan bahwa Rusia terancam Barat yang ingin menciptakan Eropa baru secara divisional dengan membuat Eropa Timur lebih berorientasi kepada Barat. Puncaknya bagi Ukraina terjadi saat Euromaidan dimana rakyat mengharapkan integrasi lebih mengikat kepada EU dibanding Rusia. Sejak 2010 kepemimpinan Yanukovich berusaha menghalangi negaranya untuk terlibat aktifitas lebih jauh dengan EU. Rusia merasa berkepentingan terhadap Ukraina karena selain negara tersebut merupakan negara ex-Soviet terbesar kedua dan lokasinya yang strategis diantara negara-negara Eropa, Ukraina juga memiliki tempat spesial dalam sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Rusia; menyebabkan Rusia merasa bahwa Crimea adalah milik mereka (Kucibek, 1999) dan sudah menjadi kepentingan mereka untuk menempatkan power sebagai *bargaining position* dibanding bersikap asertif menghadapi politik luar negeri Barat (Kucibek, 1999). Ini seperti ramalan Paul Kubicek (2000) menjadi kenyataan bahwa Ukraina sebagai objek vital dalam kebijakan luar negeri

Rusia terhadap Commonwealth of Independent States (CIS) harus menjadi prioritas dalam melakukan unifikasi (Kucibek, 1999).

Meskipun ditekan secara politik dan militer oleh Rusia, ancaman serta kelemahan terbesar Ukraina terletak pada sektor ekonomi. Kelemahan inilah yang bahkan sampai membuat kalangan demokrat Rusia enggan mengakui kalau Ukraina adalah negara berdaulat (Larrabee, 1996). Karena lemahnya bantuan barat, Ukraina terpaksa tunduk terhadap keinginan Rusia yang pada pertengahan dekade 90an menentang ekspansi NATO. Ketika negara ex-Soviet lain seperti Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko berpihak pada NATO, Ukraina cenderung memilih status non-blok. Namun dengan *Treaty of Friendship, Cooperation, and Partnership* pada tahun 1997 meskipun batas negara masih belum diakui Rusia, keamanan Ukraina meningkat lebih baik dengan pembagian wilayah armada laut di Laut Hitam (Larrabee, 1996). Hanya saja, kelemahan ekonomi Ukraina tidak tertolong apalagi setelah bantuan dari Rusia dicabut dan eksploitasi terhadap aspek itu dimanfaatkan, Krimea yang mayoritas warganya dari etnis Rusia sebenarnya telah terancam perebutan wilayah sejak lama. Konflik yang terjadi pada tahun 2014 silam mungkin adalah kemenangan kaum neo-imperialis yang mengutamakan kebijakan luar negeri agresif untuk mengembalikan bipolaritas keseimbangan melawan Barat dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara Slavik lainnya disekitar Laut Hitam, Balkan, dan Baltik. Perang di Ukraina ini juga mungkin adalah kelanjutan dari upaya proyeksi transatlantik dengan mendorong pengaruh dan perbatasan melampaui wilayah Eropa Timur dan Eropa Tengah sebagai respon provokasi dari beberapa negara anggota NATO yang mendeklarasikan ingin Georgia dan Ukraina untuk bergabung menjadi anggota (Ozdamar, 2014). Kurang efektifnya institusi internasional dalam menanggulangi konflik di kawasan Laut Hitam serta ketidak seimbangan militer yang memihak Rusia membuat negara-negara lain di kawasan tersebut memilih untuk tidak menggunakan kekuatan instrumen militer mereka menghadapi Rusia karena kemungkinan besar akan kalah. Multipolarisme pasca Perang-Dingin menyebabkan jaminan keamanan di wilayah Laut Hitam menjadi lebih sulit dari era sebelum ini (Ozdamar, 2014).

Beragamnya kepentingan dari negara major di wilayah tersebut (Rusia, EU, Amerika Serikat, Turki) membuat artikulasi kekuatan mengalami timpang tindih antara satu dengan yang lain terutama antara Rusia dengan Uni Eropa. Kolapsnya Uni Soviet

juga membuat Rusia merasa perlu untuk mencari identitas nasional sendiri (Allensworth, 1998). Ada sekitar 25 juta penduduk etnis Rusia yang berada diluar perbatasan Federasi Rusia. Di wilayah tenggara Ukraina orang dari beragam etnis namun berbicara bahasa Rusia dianggap sebagai orang Rusia oleh para petinggi negara dari Federasi Rusia (Tishkov, 1999). Aneksasi Krimea dan intervensi di wilayah tenggara Ukraina dibingkai oleh pemerintahan Vladimir Putin sebagai cara kotor oknum fasis di AS dan NATO yang mencoba mengoyak kemitraan tradisional dan mengakar secara historis dan demografis Rusia-Ukraina dalam *Ruskii Miir* (Russian World) (O'Loughlin, Toal and Kolosov, 2016). Bagaimanapun latar belakangnya, konflik antara Rusia-Ukraina memang tidak dapat dihindari. Manifestasinya dapat terjadi melalui berbagai bentuk bergantung kepada kondisi dan situasi politik internasional. Posibilitas konflik semakin meningkat disebabkan proyeksi negara ideal yang berbeda antara kedua belah pihak (Rakyat Ukraina mendambakan negaranya berdiri sebagai *nation-state*; sedangkan pemerintah Federasi Rusia melalui kebijakan luar negerinya mengharapkan kembali kejayaan era Imperial). Proyeksi nation-building juga penting bagi Rusia (Kiryukhin, 2016), hanya saja tidak tercapai solidaritas politik dalam penyelesaian konflik dengan Ukraina karena “kemerdekaan” yang dicapai saat peristiwa Euromaidan tidaklah mendapat pengakuan dari Rusia.

Ada kontradiksi ideologi otoritas Rusia saat ini antara yang bersikap konservatif dan liberal yang kurang diperhitungkan. Pemimpin Rusia memainkan tarik menarik isu patriotisme dan nasionalisme dan menekankan bahaya dari nasionalisme yang didasari pada sentimen etnis yang dalam beberapa kesempatan dipengaruhi oleh berbagai karya filsuf Rusia Ivan Ilyin (Chilton and Ilyin, 1993). Strategi Putin sebenarnya dapat disimplifikasi menjadi keinginan untuk mempertahankan integritas negara Rusia yang Multinasional (Kiryukhin, 2016). Presiden Putin pada tahun 2003 pernah mengatakan bahwa ideologinya berdasarkan pada patriotisme bukan nasionalisme (Novosti, 2018). Dia mengasosiasikan patriotism dengan komitmen tradisi, kontinuitas historis, dan sikap asertif modern sebagai bagian dari kekuatan negara. Berdasarkan asimilasi dan asosiasi, Ukraina dianggap sebagai bagian permanen dari identitas nasional Rusia yang jika dilihat dari sudut pandang patriotisme Rusia maka batasan sosial antara kedua *nation-state* itu tidak berarti (Novosti, 2018). Pada tahun 2014 Putin mempertegas komitmennya terkait identitas bersama yang dimiliki oleh kedua entitas negara (Rusia-Ukraina) bahwa di

Krimea, secara harfiah semuanya adalah hasil penetrasi dari sejarah serta kebanggaan Rusia. Karena di kota kuno Chersonese, Santo Vladimir (Tokoh penting Ortodoks yang menyatukan Rusia, Ukraina, dan Belarusia) pernah dibaptis. Rusia dan Ukraina menurut Putin bukanlah hanya tetangga dekat melainkan satu bangsa yang tidak bisa hidup tanpa satu sama lain (Mockba, 2018). Permasalahan krusial sejak intervensi bagi Rusia di era modern ini mengutip Kiryukhin, adalah bagaimana negara tersebut membangun citra alternatif yang atraktif selayaknya komunisme yang pada awal abad 20 sejak dibawa oleh Partai Bolshevik mampu menjadi tandingan dari kapitalisme Barat. Rusia saat ini seperti China yang lebih konservatif dengan memfokuskan pada tradisi nasional sebagai alternatif dari liberalism ala Barat.

Kesimpulan

Serangkaian aktivitas militer di Ukraina termasuk mengokupasi Krimea merupakan tindakan unilateral yang dilakukan oleh Rusia dipicu sebagian besar karena faktor geohistoris yang identikal. Secara geopolitik Ukraina diperebutkan karena berada diantara kekuatan NATO dan Federasi Rusia. Peristiwa *Euromaidan* sebagai gerakan revolusi direspon dengan aneksasi dan intervensi merupakan kemenangan kaum neo-imperialis yang akhirnya menemukan momentum untuk mengembalikan kejayaan zaman kekaisaran Rusia. Dalam multipolaritas tatanan internasional di era kontemporer ini, memastikan Krimea menjadi bagian dari federasi merupakan suatu hal signifikan dalam mengimbangi Barat dengan NATO-nya. Posisi Rusia juga semakin diuntungkan secara militer karena tidak perlu membayar uang sewa pangkalan militer mereka di Laut Hitam.

Dari segi ekonomi Ukraina kemungkinan akan mengalami kesulitan sumber daya karena Rusia adalah pemasok utama gas alam bagi Ukraina dan beberapa negara Uni-Eropa. Bagi Rusia kasus intervensi ini menyebabkan mereka kehilangan pelanggan tetap namun hal tersebut dapat diupayakan dengan mencari pangsa pasar lain selain pasar Eropa. Secara geohistoris, Rusia memiliki sejarah panjang dengan Ukraina sebagai bagian dari kaisaran bahkan era komunisme Soviet. Bahkan nama Ukraina berasal dari bahasa Rusia Okroina yang berarti periferi (pinggiran) (Rywkin, 2014). Sebagaimana yang disampaikan oleh Putin bahwa aneksasi Krimea adalah bentuk upaya penyatuan yang harus dilakukan karena Ukraina adalah saudara sebangsa dengan orang-orang Rusia. Hal itu membawa kepada justifikasi yang dilakukan oleh Rusia.

Melalui klaim historis itu Rusia menjustifikasi bahwa tindakan unilateralnya tersebut telah sesuai dengan konstitusi mereka yang mengatakan bahwa Rusia berhak melindungi warga negara lintas negara dan 2/3 penduduk Ukraina serta sekitar 90 persen penduduk di Krimea adalah orang berbahasa Rusia, yang menurut pemerintah di Rusia berarti mereka diidentifikasi sebagai orang dengan etnis Rusia. Melalui pernyataan tersebut kita bisa memahami bahwa Rusia mengedepankan sentiment etnis dibandingkan nasionalisme serta pernyataan Putin pada 2003 dan 2014 menegaskan bahwa Rusia dengan berbagai cara akan melakukan penyatuan dengan Ukraina dan Krimea sebagai kota penting bagi Rusia kuno merupakan harga mati untuk direbut. Berbeda dengan Rusia, kaum ultra-nasionalis Ukraina menginginkan untuk lepas dari bayang-bayang Rusia dan independen seutuhnya dengan menerapkan demokrasi. Di sisi lain NATO menargetkan Ukraina untuk bergabung agar posisi mereka semakin kuat di kawasan setelah merekrut beberapa negara ex-Soviet lain untuk menjadi anggota. Sikap represif Rusia dapat dimaknai sebagai respon defensif dalam mempertahankan diri dari ekspansi tersebut. Hanya saja mengingat Ukraina secara historis memiliki perjalanan sangat panjang dengan Rusia maka sangat mungkin pemerintah Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi agresifitas ekspansi NATO sekaligus menghidupkan kembali proyeksi kejayaan kekaisaran Rusia atau Uni Soviet jilid kedua.

References

- Alexseev, M. A. (2016). Backing the USSR 2.0: Russia's Ethnic Minorities and Expansionist Ethnic Russian Nationalism. *The New Russian Nationalism: Imperialism, Ethnicity and Authoritarianism 2000-2015*, 160-191.
- Allensworth, W. (1998). *The Russian Question: Nationalism, Modernization, and Post-Communist Russia*. New York: Rowman & Littlefield Publishers.
- Allison, R. (2014) 'Russian "deniable" intervention in Ukraine: How and why Russia broke the rules', *International Affairs*. doi: 10.1111/1468-2346.12170.
- Balmforth, R. (2018, November 28). *Kiev protesters gather, EU dangles aid promise*. Retrieved from Reuters.com: <https://www.reuters.com/article/us-ukraine/kiev-protesters-gather-eu-dangles-aid-promise-idUSBRE9BA04420131212>
- Biersack, J. and O'Lear, S. (2014) 'The geopolitics of Russia's annexation of Crimea:

- Narratives, identity, silences, and energy’, *Eurasian Geography and Economics*. doi: 10.1080/15387216.2014.985241.
- Blockman, S. (2015). Crimea and the quest for energy and military hegemony in the Black Sea region: governance gap in a contested geostrategic zone. *Southeast European and Black Sea Studies*, vol. 15, 179-189.
- Burnbaum, M. (2018, November 28). *Putin was surprised at how easily Russia took control of crimea*. Retrieved from The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/europe/putin-was-surprised-at-how-easily-russia-took-control-of-crimea/2015/03/15/94b7c82e-c9c1-11e4-bea5-b893e7ac3fb3_story.html?noredirect=on&utm_term=.4743512d428c
- Caputi, M. (1996). National Identity in Contemporary Theory. *Political Psychology* vol.17, no.4, 683-694.
- Casier, T. (2016) ‘From logic of competition to conflict: understanding the dynamics of EU–Russia relations’, *Contemporary Politics*. doi: 10.1080/13569775.2016.1201311.
- Chilton, P. and Ilyin, M. (1993) ‘Metaphor in Political Discourse: The Case of the ‘Common European House’’, *Discourse & Society*. doi: 10.1177/0957926593004001002.
- Delwaide, J. (2014) ‘Identity and Geopolitics: Ukraine’s Grappling with Imperial Legacies’, *Harvard Ukrainian Studies*.
- Emmers, R. (2009) *Geopolitics and maritime territorial disputes in East Asia, Geopolitics and Maritime Territorial Disputes in East Asia*. doi: 10.4324/9780203875018.
- Gidadhubli, R. G. (2018). Expansion of NATO: Russia's Dilemma. *Economic and Political Weekly*, 1885-1887.
- Götz, E. (2015) ‘It’s geopolitics, stupid: explaining Russia’s Ukraine policy’, *Global Affairs*. doi: 10.1080/23340460.2015.960184.
- Hosking, G. A. (2008). *Rulers and Victims*. Cambridge: Mass: Belknap.
- Karabanova, V. (2003). Linguistic Tools for Nation State Building: The Relationship between Ukraine and Its Russian-Speaking Crimea. *Polish Sociological Review*, 417-433.
- Kiryukhin, D. (2016) ‘Russia and Ukraine: the clash of conservative projects’, *European Politics and Society*. doi: 10.1080/23745118.2016.1154130.

- Korostelina, C. (2003) 'The multiethnic state-building dilemma: National and ethnic minorities' identities in the Crimea', *National Identities*. doi: 10.1080/1460894032000124394.
- Kucibek, P. (1999). Russian Foreign Policy and the West. *Political Science Quarterly*, vol. 114, no. 4, 547-568.
- Kulyk, V. (2016) 'Language and identity in Ukraine after Euromaidan', *Thesis Eleven*. doi: 10.1177/0725513616668621.
- Larrabee, F. S. (1996). Ukraine's Place in European and Regional Security. *Harvard Ukrainian Studies*, vol. 20, 249-270.
- Mockba, K. (2018, November 29). *Обращение Президента Российской Федерации*. Retrieved from Президент России: <http://kremlin.ru/events/president/news/20603>
- Molchanov, M. A. (1996) 'Borders of identity: Ukraine's political and cultural significance for Russia', *Canadian Slavonic Papers*. doi: 10.1080/00085006.1996.11092121.
- Nitoiu, C. (2017) 'Still entrenched in the conflict/cooperation dichotomy? EU–Russia relations and the Ukraine crisis', *European Politics and Society*. doi: 10.1080/23745118.2016.1197875.
- Novosti, R. (2018, November 29). *Патриотизм должен стать объединяющей идеологией России*. Retrieved from Владимир Путин: <https://ria.ru/politics/20030717/408317.html>
- O'Loughlin, J., Toal, G. and Kolosov, V. (2016) 'Who identifies with the "Russian World"? Geopolitical attitudes in southeastern Ukraine, Crimea, Abkhazia, South Ossetia, and Transnistria', *Eurasian Geography and Economics*. doi: 10.1080/15387216.2017.1295275.
- Olszański, T., & Kucińska, A. (2012). *Problem językowy na Ukrainie*. Warszawa: Marka Karpia = Centre for Eastern Studies.
- Ozdamar, O. (2014). Security and Military Balance in The Black Sea Region. *European and Black Sea Studies*, vol. 49, 53-61.
- Pridham, G. (2014) 'EU/Ukraine Relations and the Crisis with Russia, 2013-14: A Turning Point', *International Spectator*. doi: 10.1080/03932729.2014.965587.
- Rieker, P. and Gjerde, K. L. (2016) 'The EU, Russia and the potential for dialogue –

- different readings of the crisis in Ukraine’, *European Security*. doi: 10.1080/09662839.2016.1186013.
- Rywkin, M. (2014). Ukraine: Between Russia and The West. *American Foreign Policy Interest: The Journal of The National Committee on American Foreign Policy*.
- Shulman, S. (2004) ‘The contours of civic and ethnic national identification in Ukraine’, *Europe - Asia Studies*. doi: 10.1080/0966813032000161437.
- Smith, N. R. (2015) ‘The EU and Russia’s conflicting regime preferences in Ukraine: assessing regime promotion strategies in the scope of the Ukraine crisis’, *European Security*. doi: 10.1080/09662839.2015.1027768.
- Solchanyk, R. (1998). Russians in Ukraine: Problems and Prospects. *Harvard Ukraine Studies*, 539-553.
- Suslov, Mikhail D. (2015) Crimea Is Ours!’ Russian popular geopolitics in the new media age. *Eurasian Geography and Economics* Volume 55, 2014 - Issue 6: Discursive and Material Practices of Space and Modernization in Russia. Pages 588-609 | Received 22 Dec 2014, Accepted 03 Apr 2015, Published online: 11 May 2015
- Teper, Y. (2016) ‘Official Russian identity discourse in light of the annexation of Crimea: national or imperial?’, *Post-Soviet Affairs*. doi: 10.1080/1060586X.2015.1076959.
- Tishkov, V. (1999) ‘Ethnic conflicts in the former USSR: The use and misuse of typologies and data’, *Journal of Peace Research*. doi: 10.1177/0022343399036005005.
- Tolksdorf, D. (2015) ‘Russia, the USA and the EU and the conflicts in the wider Black Sea region: the potential for multilateral solutions in the wake of the Ukraine conflict’, *Global Affairs*. doi: 10.1080/23340460.2015.1080886.
- Tolz, V. (2002) ‘“Cultural bosses” as patrons and clients: The functioning of the Soviet creative Unions in the postwar period’, *Contemporary European History*. doi: 10.1017/S0960777302001054.
- Ukraine, N. S. (2018, November 19). *Speech of Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine Oleksandr Turchynov at the Operational Meeting of the Leadership of the Armed Forces of Ukraine*. Retrieved From National Security and Defense Council of Ukraine: <http://www.rnbo.gov.ua/en/news/2712.html>

- Westerlund, F. and Norberg, J. (2016) 'Military Means for Non-Military Measures: The Russian Approach to the Use of Armed Force as Seen in Ukraine', *Journal of Slavic Military Studies*. doi: 10.1080/13518046.2016.1232560.
- Yekelchik, S. (2013) 'The Ukrainians: Unexpected Nation.', *Slavonic & East European Review*.